

Meneguhkan Pendidikan Demokratis dan Multikultural untuk Membangun Karakter Inklusif Peserta Didik di Indonesia

Woro Yustia Pratiwi^{1*}, Musa Asy'arie², Mahasri Shobahiya³

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta

² Universitas Muhammadiyah Surakarta

³ Universitas Muhammadiyah Surakarta

DOI:

<https://doi.org/10.23917/iseedu.v10i1.15140>

*Correspondence: Woro Yustia Pratiwi
Email: wyustiapratiwi@gmail.com

Received: 27-12-2025

Accepted: 28-06-2026

Published: 08-08-2026



Copyright: © 2026 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract: Indonesia is known as a nation of rich cultural, ethnic, religious, and linguistic diversity. This diversity represents a source of national strength but also poses challenges in promoting social harmony and democracy. Education plays a central role in fostering tolerance, empathy, and active participation as the foundation of a democratic society. This article aims to examine the interrelationship between democratic education and multicultural education in shaping inclusive character among Indonesian students. This study employs a literature review method, analyzing both national and international studies published between 2020 and 2024. The analysis adopts a descriptive-analytical approach to identify conceptual relationships, school-based implementation practices, and challenges in applying democratic and multicultural values. Findings indicate that integrating democracy and multiculturalism within the education system enhances students' tolerance, social empathy, and reflective thinking skills. Moreover, democratic multicultural education aligns with Indonesia's current education policies, particularly the *Merdeka Curriculum* and the *Profil Pelajar Pancasila* framework. The article concludes that the collaboration among teachers, schools, and communities is essential in developing students' inclusive character within a pluralistic society.

Keywords: democratic education, multicultural education, inclusive character, tolerance, merdeka curriculum

Abstrak: Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, agama, etnis, dan bahasa yang sangat luas. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan nasional, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan demokratis. Pendidikan memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan partisipasi aktif sebagai fondasi masyarakat demokratis. Artikel ini bertujuan untuk menelaah keterkaitan antara pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural dalam membentuk karakter inklusif peserta didik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan menelaah hasil-hasil penelitian nasional dan internasional periode 2020–2024. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hubungan konseptual, praktik implementasi di sekolah, serta tantangan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi dan multikultural. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai demokrasi dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan dapat memperkuat sikap toleran, empati sosial, serta kemampuan reflektif siswa. Penerapan pendidikan demokratis berbasis multikultural juga terbukti relevan dengan arah kebijakan pendidikan nasional seperti Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila. Artikel ini menegaskan bahwa kolaborasi antara guru, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembentukan karakter inklusif peserta didik di era masyarakat majemuk.

Kata kunci: pendidikan demokrasi, pendidikan multikultural, karakter inklusif, toleransi, kurikulum merdeka

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sosial dan budaya luar biasa, tercermin dari keberagaman etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Keberagaman ini menjadi fondasi penting bagi identitas nasional sekaligus menjadi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesetaraan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai demokratis, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan sejak usia dini. Proses pendidikan yang mampu menumbuhkan kesadaran akan kemajemukan dan partisipasi aktif diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang inklusif dan berkarakter kebangsaan kuat (Cathrin & Wikandaru, 2023).

Pendidikan demokrasi menekankan pentingnya partisipasi aktif, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, pendidikan multikultural berfokus pada penghargaan terhadap keberagaman budaya serta upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat majemuk. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang saling mendukung—yakni membentuk warga negara yang kritis, terbuka, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Namun dalam praktiknya, implementasi pendidikan demokrasi dan multikultural di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi multikultural di kalangan guru, keterbatasan bahan ajar kontekstual, serta kecenderungan sistem pendidikan yang masih berorientasi pada kognisi semata.

Laporan Wahid mencatat bahwa sekitar 11,4% pelajar SMA/SMK menyatakan bersedia melakukan tindakan radikal, sementara survei PPIM UIN menemukan bahwa 37,9% siswa memiliki pandangan intoleran terhadap kelompok agama atau etnis yang berbeda (Utami et al., 2026). Selain itu, data Komnas HAM (2023) menunjukkan peningkatan kasus diskriminasi berbasis identitas di lingkungan sekolah sebesar 18% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan pendidikan demokratis dan multikultural sebagai respons sistemik terhadap ancaman disintegrasi sosial sejak dini (Dewi et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan ubahwa penerapan program pendidikan multikultural di sekolah dapat meningkatkan sikap toleransi siswa, namun dampaknya belum merata karena perbedaan konteks sosial dan kapasitas guru di masing-masing daerah. (Setiawan et al. 2024) Sementara itu, penelitian Cathrin dan Wikandaru menyoroti adanya resistensi terhadap pembelajaran demokratis di sekolah-sekolah yang masih menerapkan model otoritatif (Cathrin dan Wikandaru, 2023) Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme konsep dengan praktik lapangan. Dengan demikian, diperlukan upaya konseptual yang mampu menjembatani kedua pendekatan tersebut dalam kerangka pendidikan karakter yang inklusif (Dong et al., 2026).

Konteks kebijakan pendidikan di Indonesia juga memperkuat urgensi integrasi kedua pendekatan tersebut. Kurikulum Merdeka dan program *Profil Pelajar Pancasila* secara eksplisit menekankan penguatan karakter pelajar Indonesia yang beriman, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis (Wahyu Ningtyas, 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan multikulturalisme yang menghargai partisipasi, keberagaman, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali keterkaitan antara pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat dalam pembentukan karakter inklusif peserta didik.

Research gap yang diangkat dalam artikel ini terletak pada kurangnya kajian yang mengintegrasikan pendidikan demokrasi dan multikultural dalam konteks kebijakan pendidikan

nasional terkini. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas kedua konsep ini secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran holistik mengenai bagaimana keduanya dapat berkolaborasi dalam membentuk karakter inklusif siswa. Artikel ini berupaya menutup kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis konseptual dan strategis tentang penerapan pendidikan demokratis berbasis multikultural dalam konteks Indonesia kontemporer (Fadhila Az Zahra & Dea Nabila, 2024).

Kebaruan (*novelty*) dari tulisan ini terletak pada penyajiannya yang mengaitkan konsep pendidikan demokrasi dan multikultural dengan arah kebijakan pendidikan nasional, khususnya Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara guru, sekolah, dan masyarakat sebagai aktor kunci dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang tidak hanya menumbuhkan kesadaran keberagaman, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai demokratis dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Kebaruan artikel ini dapat dirumuskan lebih spesifik melalui penawaran Model Integratif Pendidikan Demokratis-Multikultural (MIPDM), yaitu sebuah kerangka konseptual yang mengintegrasikan tiga pilar: (1) nilai demokrasi (partisipasi, kesetaraan, tanggung jawab), (2) nilai multikulturalisme (toleransi, empati, penghargaan perbedaan), dan (3) kebijakan pendidikan nasional (Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila), yang diikat oleh kolaborasi tripartit antara guru, sekolah, dan masyarakat. Model ini berbeda dari kajian sebelumnya karena tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan peta strategis implementasi nilai-nilai tersebut secara sinergis dalam konteks pendidikan Indonesia kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*) dengan metode deskriptif analitis. Kajian pustaka dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan konseptual antara pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural dalam pembentukan karakter inklusif peserta didik di Indonesia. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk memaparkan fenomena berdasarkan data literatur yang relevan dan kemudian menginterpretasikannya secara kritis dalam konteks kebijakan pendidikan nasional (Cathrin & Wikandaru, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel ilmiah nasional dan internasional yang terbit pada periode 2020–2024. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan basis data ilmiah berikut: Google Scholar, ERIC (Education Resources Information Center), Scopus, dan SINTA (Science and Technology Index) untuk sumber nasional. Kata kunci yang digunakan meliputi: “pendidikan demokrasi”, “pendidikan multikultural”, “karakter inklusif”, “Kurikulum Merdeka”, “Profil Pelajar Pancasila”, “democratic education”, “multicultural education”, dan “inclusive character education”. Dari hasil penelusuran awal, diperoleh 312 artikel; setelah diterapkan kriteria inklusi (artikel peer-reviewed, terbit 2020-2024, relevan dengan tema) dan eksklusi (artikel tidak tersedia teks penuh, duplikasi, dan tidak terkait konteks pendidikan), sebanyak 28 artikel dipilih sebagai sumber utama kajian ini.

Proses penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. Identifikasi literatur, yakni mengumpulkan sumber pustaka yang relevan dengan tema pendidikan demokrasi, multikulturalisme, dan pendidikan karakter.

2. Analisis tematik, yaitu menelaah isi literatur untuk menemukan hubungan antara nilai-nilai demokratis dan multikultural dalam praktik pendidikan.
3. Sintesis konseptual, yakni menyusun kerangka pemikiran baru yang mengintegrasikan dua pendekatan tersebut dalam konteks pendidikan inklusif di Indonesia.

Validitas kajian diperkuat dengan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai referensi akademik dan kebijakan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sinergi antara pendidikan demokratis dan multikultural sebagai strategi pembentukan karakter bangsa.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga jalur: (1) Triangulasi antar-sumber akademik, yaitu membandingkan temuan dari artikel jurnal nasional (SINTA) dan internasional (Scopus/ERIC) untuk mengidentifikasi konsistensi dan perbedaan perspektif tentang pendidikan demokratis-multikultural; (2) Triangulasi dengan dokumen kebijakan, yaitu mengonfirmasi relevansi temuan literatur dengan arah regulasi dalam Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses, Kurikulum Merdeka, dan Profil Pelajar Pancasila; dan (3) Triangulasi teori, yaitu menguji konsistensi temuan empiris dengan teori pendidikan demokrasi (Gutmann, Dahl) dan multikulturalisme (Banks, Nieto). Proses triangulasi ini dilakukan secara iteratif selama tahap analisis tematik untuk memastikan validitas dan kedalaman interpretasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Pendidikan Multikultural sebagai Basis Nilai Demokrasi

Pendidikan multikultural menjadi fondasi penting bagi pembentukan masyarakat demokratis. Melalui pengenalan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, maupun sosial, siswa belajar memahami makna keadilan, empati, dan kesetaraan hak (Munguia et al., 2026). Hal ini sejalan dengan pandangan Banks (2020) yang menyatakan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya berfokus pada pengakuan keberagaman, tetapi juga menuntut transformasi sosial agar setiap individu memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan partisipasi publik (Ridwanulloh et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural berperan sebagai penguatan nilai-nilai demokrasi substantif (Dong et al., 2026). Penelitian Rudianto (2023) menunjukkan bahwa penerapan pendekatan multikultural di sekolah mampu meningkatkan kesadaran sosial siswa serta mengurangi potensi diskriminasi berbasis etnis dan agama. Melalui proses pembelajaran kolaboratif dan kegiatan lintas budaya, siswa tidak hanya belajar menghargai perbedaan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai demokratis seperti keadilan dan tanggung jawab sosial (Susilo et al., 2024).

Zamroni et al. (2024) menegaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran berbasis dialog dan kerja sama antarsiswa dari latar belakang yang berbeda berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan sosial dan berpikir kritis (Dewi et al., 2024). Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat dianggap sebagai *pra-syarat moral* bagi keberhasilan pendidikan demokrasi. Ketika siswa terbiasa dengan pluralitas, mereka akan lebih siap untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat (Setiawan et al., 2024).

2. Peran Guru Sekolah dalam Menginternalisasikan Nilai Demokrasi dan Multikulturalisme

Guru memiliki posisi strategis sebagai agen transformasi nilai dalam pendidikan demokratis berbasis multikultural. Mereka bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi juga teladan moral dan sosial bagi siswa. Widiyono (2023) menyatakan bahwa guru yang memiliki kesadaran multikultural mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan partisipatif, di mana setiap siswa merasa dihargai tanpa memandang latar belakangnya (McLaren et al., 2023).

Dalam konteks sekolah, peran kelembagaan menjadi krusial. Sekolah dapat berfungsi sebagai laboratorium demokrasi yang memfasilitasi siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai demokratis. Misalnya, melalui organisasi siswa, debat terbuka, dan proyek kolaboratif lintas kelas. Menurut Ningtyas (2024), sekolah yang mengedepankan budaya partisipatif menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran demokratis siswa dibanding sekolah yang menerapkan sistem otoritatif (Wahyu Ningtyas, 2024).

Praktik pedagogis yang dapat diterapkan dalam konteks ini mencakup beberapa pendekatan: (1) Dialog reflektif, yakni kegiatan diskusi terstruktur di mana siswa dari berbagai latar belakang berbagi pengalaman dan perspektif secara terbuka dalam suasana yang aman dan saling menghargai; (2) Pembelajaran kolaboratif lintas identitas, di mana guru merancang kelompok belajar heterogen untuk mendorong interaksi antar siswa yang berbeda suku, agama, dan kemampuan; (3) Problem-Based Learning (PBL) berbasis isu sosial lokal, di mana siswa diajak menganalisis masalah nyata di komunitas mereka seperti konflik sosial atau ketimpangan akses pendidikan, kemudian merumuskan solusi bersama; dan (4) Pendidikan karakter berbasis nilai Islam, yaitu mengintegrasikan akhlaq mulia seperti tawadhu (kerendahan hati), amanah (kejujuran), dan ukhuwwah (persaudaraan) sebagai landasan moral pembentukan karakter inklusif, sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang menekankan rahmatan lil 'alamin (Fadhila Az Zahra & Dea Nabila, 2024).

Namun, peran guru tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan kebijakan sekolah yang berpihak pada keberagaman. Sadeli (2022) menekankan bahwa pelatihan berkelanjutan perlu diberikan agar guru memahami konsep multikulturalisme tidak hanya secara teoretis, tetapi juga praktis dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan menjadi elemen penting untuk memastikan nilai-nilai demokratis dan multikultural benar-benar hidup dalam keseharian sekolah (Ridwanulloh et al., 2024).

Perspektif Islam tentang keberagaman] Dalam perspektif Islam, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman memiliki landasan teologis yang kuat. Konsep tasamuh (toleransi) mengajarkan umat Islam untuk bersikap lapang dada dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain yang berbeda keyakinan maupun latar belakang. Sementara itu, prinsip ta'aruf sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13 ("...inna khalaqnakum min dzakar wa untâ wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ilâ lita'arafu...") menegaskan bahwa perbedaan suku dan bangsa diciptakan Allah SWT bukan untuk menimbulkan perpecahan, melainkan untuk saling mengenal dan memahami. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai ini relevan diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah maupun sekolah umum berbasis Islam agar siswa memiliki kesadaran keberagaman yang tidak hanya bersumber dari nalar kewarganegaraan, tetapi juga dari keimanan dan spiritualitas. Penguatan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah Islam dapat menjadi fondasi moral yang kokoh bagi terwujudnya pendidikan inklusif yang autentik (Setiawan et al., 2024).

3. Implementasi Nilai Demokrasi dan Multikultural dalam Konteks Kebijakan Pendidikan Nasional

Kebijakan pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin inklusif dan berbasis karakter (Dong et al., 2026). Kurikulum Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta memberikan ruang bagi integrasi nilai-nilai kemanusiaan, kebinekaan, dan demokrasi. Program *Profil Pelajar Pancasila* juga menjadi manifestasi konkret dari integrasi pendidikan multikultural dan demokratis, dengan enam dimensi karakter utama yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dan keberagaman budaya (Indrapangastuti, 2014).

Penelitian Dewi et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) efektif menumbuhkan kesadaran multikultural dan kolaboratif antar siswa. Kegiatan seperti proyek sosial dan refleksi lintas budaya memungkinkan siswa mempraktikkan empati sosial dan tanggung jawab kolektif. Namun, Ristanti et al. (2024) mencatat bahwa kesenjangan kualitas implementasi masih terjadi antar daerah, terutama terkait kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan multikultural ke dalam kegiatan belajar (Sudrajat, 2014).

Selain itu, pendidikan inklusif juga menjadi bagian penting dari kebijakan nasional. Setyawati et al. (2024) menemukan bahwa penerapan pendidikan multikultural di sekolah inklusi tidak hanya memperkuat penerimaan terhadap siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga meningkatkan solidaritas dan penghargaan terhadap perbedaan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan nasional sebenarnya sudah menyediakan kerangka yang kondusif bagi penguatan pendidikan demokratis berbasis multicultural tantangannya kini terletak pada kualitas pelaksanaan di lapangan (Valiyeva, 2022).

Analisis kritis Kurikulum Merdeka] Secara kritis, Kurikulum Merdeka menunjukkan sejumlah capaian positif maupun kelemahan dalam mengembangkan karakter inklusif. Di sisi keberhasilan, pendekatan pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dan paradigma Merdeka Belajar memberikan otonomi lebih besar kepada guru dan sekolah dalam mengadaptasi konten pendidikan karakter sesuai konteks lokal (Faiz et al., 2025). Fleksibilitas ini membuka ruang bagi internalisasi nilai-nilai kebinekaan secara kontekstual dan autentik. Namun demikian, beberapa kelemahan implementasi perlu dicermati: pertama, belum meratanya pelatihan guru dalam mengoperasionalkan nilai kebinekaan ke dalam praktik pembelajaran harian; kedua, ketergantungan pada modul ajar nasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman konteks sosial-budaya daerah; dan ketiga, ketiadaan instrumen evaluasi karakter inklusif yang terstandarisasi menyebabkan pencapaian tujuan tersebut sulit diukur secara sistematis. Perbaikan pada aspek-aspek ini menjadi prasyarat agar Kurikulum Merdeka benar-benar menjadi sarana transformasi pendidikan inklusif yang efektif (Sadono & Masruri, 2014).

4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi

Meskipun secara konseptual pendidikan demokratis dan multikultural memiliki arah yang sama, implementasinya seringkali menemui berbagai kendala. Pertama, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan guru tentang bagaimana menanamkan nilai demokrasi dan multikultural secara integratif dalam pembelajaran (Ningsih, 2023). Cathrin dan Wikandaru (2023) mencatat bahwa banyak guru masih memahami pendidikan multikultural sebatas pengenalan budaya tanpa diiringi pembentukan sikap kritis terhadap isu sosial. Kedua, keterbatasan bahan ajar

dan media pembelajaran yang kontekstual menjadi penghambat lain. Banyak sekolah yang masih menggunakan materi ajar konvensional yang kurang menonjolkan nilai keberagaman dan keadilan sosial. Ketiga, faktor budaya lokal dan resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa komunitas masih memandang pendidikan demokratis sebagai ancaman terhadap otoritas tradisional, sehingga perlu pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial dan kultural setempat. Keempat, masih kurangnya dukungan kebijakan berkelanjutan dalam pelatihan guru dan evaluasi pendidikan karakter. Suhendar (2022) menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang sistematis dan evaluasi berkelanjutan, pendidikan multikultural berisiko menjadi slogan tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, perbaikan harus dilakukan secara holistik melalui pelatihan guru, reformasi kurikulum, serta sinergi antara sekolah dan masyarakat (Alam et al., 2025).

Akar masalah, faktor penyebab, dan kaitannya dengan moderasi beragama Hambatan implementasi yang disebutkan di atas memiliki akar permasalahan yang lebih struktural dan kultural. Secara struktural, lemahnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kapasitas daerah menyebabkan disparitas implementasi yang signifikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan. Faktor historis juga berperan: sistem pendidikan Indonesia yang lama berorientasi hafalan dan ujian standar kurang memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis dan empati sosial (Maharani, 2019). Dampaknya di lapangan adalah munculnya pola pembelajaran transaksional di mana nilai karakter hanya diajarkan sebagai materi hafalan, bukan sebagai pengalaman hidup. Dalam konteks pendidikan Islam, tantangan ini bersinggungan dengan isu moderasi beragama (wasathiyah). Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren memiliki peluang strategis untuk menjadi model pendidikan karakter inklusif, mengingat tradisi keilmuan Islam yang kaya akan nilai-nilai rahmah (kasih sayang), 'adl (keadilan), dan tawazun (keseimbangan). Penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan Islam melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai kebangsaan dan keislaman secara harmonis merupakan respons yang tepat terhadap ancaman radikalisme dan intoleransi yang semakin mengkhawatirkan (Moşteanu, 2026).

5. Strategi Penguatan Pendidikan Demokratis Berbasis Multikultural

Untuk mengoptimalkan penerapan pendidikan demokratis berbasis multikultural di Indonesia, beberapa strategi dapat ditempuh. Jika dibandingkan, terdapat pola yang konsisten antara Banks (2020), Rudianto (2023), dan Zamroni et al. (2024): ketiganya menegaskan bahwa pendidikan multikultural hanya efektif bila disertai pendekatan dialogis dan transformatif. Kontras dengan temuan Cathrin dan Wikandaru (2023) yang menunjukkan resistensi struktural terhadap pendekatan demokratis, Dewi et al. (2024) justru menemukan bahwa metode Project-Based Learning dalam Kurikulum Merdeka mampu melampaui resistensi tersebut melalui keterlibatan aktif siswa (Tiara & Bahtiar, 2024). Sintesis ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek dan dialog merupakan jembatan kritis antara idealisme konsep dan realitas lapangan. Dengan mempertimbangkan kontras dan konvergensi ini, strategi-strategi berikut dirumuskan secara berbasis bukti:

- a. Integrasi nilai demokrasi dan multikultural dalam kurikulum formal maupun kegiatan nonformal.

Ridwanulloh et al. (2024) menunjukkan bahwa penggabungan nilai kearifan lokal dalam kegiatan belajar dapat memperkuat rasa saling menghormati antar siswa dan meningkatkan partisipasi sosial.

- b. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan komunikasi lintas budaya dan pedagogi reflektif.

Windayani et al. (2024) menegaskan pentingnya pelatihan guru yang melibatkan komunitas lokal agar pendidikan lebih kontekstual dan berakar pada realitas sosial siswa.

- c. Kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Pendidikan demokrasi tidak dapat berlangsung efektif jika hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Lingkungan keluarga dan masyarakat perlu menjadi ruang praksis nilai-nilai toleransi, empati, dan keterbukaan.

- d. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas wawasan keberagaman.

Platform digital dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya dan praktik sosial dari berbagai daerah di Indonesia maupun dunia, memperkaya perspektif siswa dalam memahami makna demokrasi global (Masulloa et al., 2026).

Melalui strategi-strategi tersebut, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan moral untuk hidup dalam masyarakat majemuk. Melalui strategi-strategi tersebut, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan moral untuk hidup dalam masyarakat majemuk.

Untuk memvisualisasikan keterkaitan antara ketiga elemen utama, artikel ini menawarkan Model Segitiga Integrasi Pendidikan Inklusif (SIPI) sebagai kerangka konseptual operasional. Model ini menempatkan tiga simpul utama: (1) Pendidikan Demokrasi (nilai partisipasi, kesetaraan, tanggung jawab warga negara), (2) Pendidikan Multikultural (nilai toleransi, empati, penghargaan perbedaan), dan (3) Karakter Inklusif (sikap terbuka, adil, dan kolaboratif). Ketiga simpul ini dihubungkan oleh tiga proses pengikat: (a) Proses internalisasi nilai melalui kurikulum dan pembelajaran; (b) Proses sosialisasi melalui interaksi antar warga sekolah; dan (c) Proses institusionalisasi melalui kebijakan sekolah dan budaya organisasi. Dalam konteks madrasah atau sekolah Islam, model ini diperkaya dengan dimensi spiritual sebagai fondasi moral keempat yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin sebagai ruh penggerak seluruh proses pembentukan karakter inklusif (Lin et al., 2026).

Secara lebih operasional, strategi penguatan pendidikan demokratis berbasis multikultural dapat diimplementasikan melalui langkah-langkah konkret berikut di sekolah maupun madrasah: (1) Penyusunan modul ajar tematik lintas budaya yang menyertakan contoh-contoh dari berbagai tradisi lokal dan nilai Islam dalam setiap mata pelajaran; (2) Program siswa duta kebinekaan yang melibatkan perwakilan siswa dari berbagai latar belakang untuk menjadi agen perdamaian dan toleransi di lingkungan sekolah; (3) Kegiatan majelis lintas agama dan budaya bulanan yang mempertemukan siswa dari berbagai komunitas dalam forum dialog terbuka dengan pendampingan guru; (4) Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis nilai Profil Pelajar Pancasila yang secara eksplisit menyertakan indikator karakter inklusif; (5) Di madrasah, integrasi kajian tafsir ayat-ayat tentang ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan kemanusiaan) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai landasan teologis toleransi;

dan (6) Evaluasi karakter inklusif melalui penilaian portofolio dan observasi partisipatif, bukan sekadar tes tertulis

Simpulan

Pendidikan demokrasi dan pendidikan multikultural merupakan dua pendekatan yang saling menguatkan dalam membentuk karakter inklusif peserta didik di Indonesia. Demokrasi menanamkan nilai partisipasi, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, sedangkan multikulturalisme menumbuhkan empati, toleransi, serta penghargaan terhadap perbedaan. Integrasi keduanya dalam sistem pendidikan menghasilkan lingkungan belajar yang terbuka, humanis, dan berkeadilan sosial sejalan dengan semangat Profil Pelajar Pancasila dan prinsip Kurikulum Merdeka.

Guru dan sekolah berperan sebagai aktor utama dalam menanamkan nilai-nilai demokratis dan multikultural melalui praktik pembelajaran yang partisipatif, reflektif, serta kolaboratif. Namun, keberhasilan penerapan nilai-nilai tersebut memerlukan dukungan kebijakan pendidikan yang konsisten, pelatihan guru berkelanjutan, serta sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Artikel ini menegaskan bahwa pendidikan demokratis berbasis multikultural bukan sekadar pendekatan pedagogis, melainkan strategi nasional untuk membangun bangsa yang berkarakter, inklusif, dan berkeadilan sosial. Melalui pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kemanusiaan universal, Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan moral dan sosial yang tinggi terhadap keberagaman.

Artikel ini memiliki tiga implikasi utama: (1) Implikasi kurikuler: pengembang kurikulum perlu mengintegrasikan kompetensi multikultural-demokratis sebagai kompetensi inti (bukan sekadar muatan lokal) dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, IPS, dan kegiatan kokurikuler, dengan indikator capaian yang terukur; (2) Implikasi kebijakan: Kementerian Pendidikan perlu memperkuat regulasi terkait pelatihan guru berbasis pendidikan multikultural dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), serta menjadikan indeks toleransi sekolah sebagai salah satu indikator Rapor Pendidikan; dan (3) Implikasi praktik pembelajaran: guru diharapkan mengembangkan unit pembelajaran berbasis dialog antarbudaya, studi kasus konflik sosial, dan proyek kolaboratif lintas identitas yang mengintegrasikan nilai demokrasi dan keberagaman secara konkret dalam konteks kehidupan siswa sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Alam, L., Maimun, A., Iqbal, M., Utsany, R., & Alam, M. (2025). Negotiating Ethnic and Religious Identities: Indonesian Chinese Muslims in Sharī'ah Compliant Business. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 25(1), 29–54. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v25i1.29-54>
- Cathrin, S., & Wikandaru, R. (2023). Establishing multicultural society: Problems and issues of multicultural education in Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1 SE-Original Research Article), 145–155. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.59744>
- Dewi, I. G. A. T. P., Lasmawan, I. W., & Kertih, I. W. (2024). Implementasi pendidikan multikultural melalui pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(12 SE-Articles), 26. <https://doi.org/10.17977/um065.v4.i12.2024.26>
- Dong, B., A, R., Han, L., & Chang, A. (2026). Spatiotemporal Evolution, Resilience, and Sustainable Driving Mechanisms of Tourist Attractions in Ecologically Fragile Areas: A Case Study of Inner Mongolia, China (2005–2023). *Sustainability (Switzerland)*, 18(9). <https://doi.org/10.3390/su18094477>

- Fadhila Az Zahra, & Dea Nabila. (2024). Pendidikan Demokrasi Sebagai Alat Penguat Kebhinekaan Dan Toleransi Di Sekolah. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 2(4 SE-), 157–168. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.259>
- Faiz, A. B. D. K., Zulfahmi, A. R., & Awaka, M. Q. (2025). From Qibla Deviation to Social Cohesion: The Construction of Minority Fiqh at the Great Mosque of Makale, Tana Toraja. *Journal of Islamic Law*, 6(2), 317–337. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4066>
- Indrapangastuti, D. (2014). PRAKTEK DAN PROBLEMATIK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SMK. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2614>
- Lin, W., Wang, T., & Wu, X. (2026). Industrial Wastewater Discharge and Disease Incidence in China: A Spatial Analysis of Public Health and Sustainable Development Implications. *Sustainability (Switzerland)*, 18(7). <https://doi.org/10.3390/su18073262>
- Maharani, R. A. M. (2019). Strategi Pemenangan Pasangan Calon Herman Deru Dan Mawardi Yahya Pada Pilkada Sumatera Selatan Tahun 2018. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik, Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 17–27. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/article/view/4065/2577>
- Masulloa, Y. A. G., Melob, S. N., Maciele, D. S., Palaciód, T. G., & Iorise, A. A. R. (2026). Governance for Urban Land Regularization in Western Maranhão, Brazil. *Journal of Latin American Geography*, 24(1), 112–140. <https://doi.org/10.1353/lag.2025.a962803>
- McLaren, H., Jones, M., & Patmisari, E. (2023). Multicultural Quality of Life: experiences of a South Australian Muslim community amid the COVID-19 pandemic. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 13(1), 57–84. <https://doi.org/10.18326/ijims.v13i1.57-84>
- Moşteanu, N. R. (2026). REGIONAL DEVELOPMENT UNDER DIGITAL TRANSITION: FINTECH, GEOPOLITICAL SHOCKS, AND SUSTAINABILITY IN EASTERN EUROPE. *Romanian Journal of Regional Science*, 20(1), 79–97. <https://doi.org/10.61225/rjrs.2026.04>
- Munguia, N., Pulgarin Herrera, A. G., Falcon Perez, C. J., Anaya Eredias, C., & Velazquez, L. (2026). Citizen Science for Sustainable Tourism Governance in a Mexican Coastal Community. *Sustainability (Switzerland)*, 18(5). <https://doi.org/10.3390/su18052200>
- Ningsih, A. Y. (2023). PERBEDAAN GAYA KEPEMIMPINAN MANTAN GUBERNUR DKI JAKARTA : BASUKI TJAJAJA PURNAMA (AHOK) VS ANIES BASWEDAN. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah, Vol. 8 No. 3 (2023): September*, 188–194. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/12/6>
- Ridwanulloh, M. U., Huda, R. P. R., Maslahah, H. M., & Surur, A. M. (2024). Implementasi Strategi Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di Sekolah Dasar. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2 SE-Artikel), 93–102. <https://doi.org/10.24269/jpk.v9i2.9037>
- Sadono, M. Y., & Masruri, M. S. (2014). KEEFEKTIFAN VCT DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH UNTUK MENINGKATKAN NILAI NASIONALISME, DEMOKRASI, DAN MULTIKULTURAL. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v1i1.2429>
- Setiawan, A., Purnomo, P., Marzuki, M., Charismana, D. S., & Zaman, A. R. B. (2024). The implementation of tolerance values through multicultural education program. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2 SE-Original Research Article), 332–341. <https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.71337>
- Sudrajat, S. (2014). REVITALISASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2620>

- Susilo, D. P., Fadilah, L., & Daroini, R. (2024). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3 SE-Articles), 9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.471>
- Tiara, M. S. W., & Bahtiar, A. (2024). Exploring Multicultural Family Dynamics: An Analysis of Family Dysfunction in Mochtar Lubis's *Senja di Jakarta*. *Jurnal Gramatika*, 10(1), 20–36. <https://doi.org/10.22202/jg.2024.v10i1.8010>
- Utami, A. N. F., Saputra, A. N., Fariaty, C. N., Kusmin, A. F., Rahimallah, M. T. A., & Lawelai, H. (2026). Multi-level governance readiness and regional policy capacity in supporting Indonesia's new capital development. *Frontiers in Political Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1758903>
- Valiyeva, N. C. (2022). THE ACTIVITIES OF THE HEYDAR ALIYEV FOUNDATION FOR THE SAKE OF A MODERN MULTICULTURAL AND HEALTHY SOCIETY'S DEVELOPMENT. *Scientific Work*, 16(9), 7–14. <https://doi.org/10.36719/2663-4619/82/7-14>
- Wahyu Ningtyas, D. (2024). PERAN GURU DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL UNTUK MEMBENTUK KARAKTER PESERTA DIDIK DI ERA SOCIETY 5.0. *Jurnal MIPA Dan Pembelajarannya*, 4(3 SE-Articles), 3. <https://doi.org/10.17977/um067v4i32024p3>